
DAMPAK KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP PERTUMBUHAN INDUSTRI MICE DI LABUAN BAJO

Oleh

Protasius Jehane¹, Elim Lau² & Hilaria Kaka³

^{1,2,3} Program Studi Usaha Perjalanan Wisata, Jurusan Pariwisata, Politeknik Negeri

Kupang, Indonesia

E-mail: ¹berijehane@gmail.com, ²elimralau@gmail.com, & ³hilariaambukaka@gmail.com

Article History:

Received: 23-09-2025

Revised: 24-10-2025

Accepted: 27-10-2025

Keywords:

MICE, efisiensi anggaran, pariwisata, Labuan Bajo, industri kreatif.

***Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap pertumbuhan industri MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) di Labuan Bajo sebagai salah satu Destinasi Super Prioritas nasional. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan wawancara mendalam serta data sekunder dari berbagai lembaga pemerintah dan asosiasi industri, penelitian ini mengidentifikasi penurunan signifikan dalam lima indikator utama: jumlah event MICE, jumlah peserta, lama tinggal, pendapatan sektor pendukung, dan tingkat hunian hotel. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdampak negatif terhadap pertumbuhan MICE, meskipun terdapat upaya adaptif dari pelaku industri lokal. Penelitian ini juga akan mendiskusikan kemungkinan yang bisa dijadikan sebagai referensi pendukung upaya adaptif yang dimaksudkan.*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata di Indonesia semakin menunjukkan perannya sebagai salah satu tulang punggung penggerak perekonomian nasional. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus meningkat dari 3,6% pada tahun 2022 menjadi 4,1% di tahun 2023, dengan target sebesar 4,6% untuk tahun 2024. Angka-angka tersebut menjadi bukti bahwa pariwisata tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga strategis dalam mendukung pemulihan pasca-pandemi.

Selain kontribusi terhadap PDB, sektor ini juga berperan besar dalam membuka lapangan kerja. Pada tahun 2024, jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 25,01 juta orang, naik 2,5% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 24,41 juta orang. Peningkatan ini selaras dengan pertumbuhan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Pemerintah pun menargetkan jumlah tenaga kerja di sektor ini akan meningkat hingga 25,8 juta orang pada tahun 2025, sebuah angka yang menunjukkan optimisme tinggi terhadap masa depan industri pariwisata.

Sebagai negara kepulauan dengan kekayaan alam dan budaya yang beragam, Indonesia memiliki potensi besar di bidang pariwisata. Sektor ini tidak hanya menghasilkan pendapatan daerah, tetapi juga mendorong pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya memperkuat fondasi pengembangan destinasi wisata melalui berbagai program strategis.

Namun di tengah upaya percepatan pengembangan tersebut, pemerintah juga menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sebagai bagian dari penguatan fiskal nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang nyata bagi pembangunan. Sayangnya, dalam konteks pengembangan pariwisata, efisiensi

anggaran bisa membawa tantangan tersendiri. Di satu sisi, kebijakan ini mendorong pengelolaan yang lebih disiplin dan rasional. Di sisi lain, pengurangan alokasi anggaran bisa berdampak pada keterbatasan promosi, pembangunan infrastruktur, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di kawasan-kawasan wisata.

Labuan Bajo merupakan salah satu destinasi utama yang masuk dalam program “10 Bali Baru”. Wilayah ini tengah mengalami perkembangan pesat, khususnya dalam pengembangan industri MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Sebagai tuan rumah penyelenggaraan acara internasional seperti ASEAN Summit dan rangkaian pertemuan G20, Labuan Bajo menjadi pusat perhatian global. Hal ini mendorong peningkatan investasi pada infrastruktur, fasilitas akomodasi, dan pusat konvensi yang membuat kawasan ini semakin kompetitif dalam skala nasional maupun regional.

Meskipun demikian, pertumbuhan yang cepat ini harus diimbangi dengan dukungan kebijakan yang memadai. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, ada risiko bahwa alokasi dana untuk pengembangan MICE, promosi internasional, dan pelatihan sumber daya manusia akan berkurang. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa menghambat momentum pertumbuhan yang sedang terbangun, terutama tanpa adanya alternatif pendanaan atau sinergi antar stakeholder.

Maka dari itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada pertumbuhan sektor pariwisata di Labuan Bajo, terutama pada pengembangan industri MICE sebagai salah satu pilar utama pengembangan wilayah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang dinamika antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan pariwisata, serta menjadi bahan pertimbangan dalam merancang strategi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan adaptif.

LANDASAN TEORI

Kebijakan publik, sebagaimana didefinisikan oleh Dye (2017), mencerminkan pilihan pemerintah, baik dalam bentuk tindakan maupun ketidakbertindakan. Dalam konteks fiskal, kebijakan efisiensi anggaran menjadi salah satu wujud nyata dari pilihan tersebut, yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan sumber daya publik agar memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal (Musgrave & Musgrave, 1989). Prinsip ini berakar pada konsep Value for Money, yang menekankan tiga pilar utama: ekonomi (mendapatkan input dengan harga terbaik), efisiensi (menggunakan input secara optimal untuk menghasilkan output), dan efektivitas (mencapai tujuan yang diinginkan) (Mardiasmo, 2009). Namun, penerapan efisiensi anggaran tidak selalu berdampak netral, terutama di sektor yang sangat bergantung pada stimulus pemerintah, seperti pariwisata. Di industri pariwisata, pembatasan anggaran dapat berimbas pada pengurangan kegiatan promosi, pelatihan sumber daya manusia (SDM), hingga pembiayaan event pemerintah. Dampaknya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menekan dinamika ekonomi lokal yang selama ini ditopang oleh aktivitas pariwisata.

Hal ini menjadi krusial ketika kita mempertimbangkan peran pariwisata, khususnya sektor MICE dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Todaro & Smith (2015), pertumbuhan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan suatu wilayah dalam memanfaatkan sumber daya lokal dan menarik investasi di sektor-sektor produktif. Sektor MICE, sebagaimana dijelaskan oleh Fletcher (1989), memiliki *multiplier effect* yang tinggi: setiap rupiah yang dibelanjakan oleh peserta MICE berputar di berbagai sektor ekonomi lokal, mulai dari akomodasi, transportasi, kuliner, hingga UMKM. Dengan kata lain, MICE bukan hanya soal pertemuan bisnis, melainkan mesin penggerak ekonomi mikro yang signifikan.

Pembatasan anggaran pemerintah untuk event MICE, oleh karenanya, bukan sekadar

penghematan fiskal. Ia berpotensi melemahkan efek pengganda tersebut, mengurangi perputaran uang di tingkat lokal, dan pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Lebih jauh lagi, keberlanjutan destinasi pariwisata juga rentan terganggu oleh kebijakan fiskal yang terlalu ketat. Model Tourism Area Life Cycle (TALC) dari Butler (1980) menggambarkan bagaimana destinasi wisata melewati tahapan, mulai dari eksplorasi, perkembangan, konsolidasi, hingga stagnasi atau bahkan penurunan. Tanpa intervensi kebijakan yang mendukung, termasuk pendanaan yang memadai untuk promosi dan pengembangan, destinasi dapat terjebak dalam fase stagnasi lebih cepat dari yang seharusnya.

Daya saing destinasi itu sendiri, menurut Ritchie & Crouch (2003), ditentukan oleh keseimbangan antara empat pilar utama: infrastruktur, kebijakan publik, kualitas SDM, dan dukungan masyarakat lokal. Jika salah satu pilar, misalnya dukungan kebijakan fiskal melemah, maka keseimbangan tersebut terganggu, dan daya saing destinasi pun menurun. Di Labuan Bajo, yang sedang bertransformasi menjadi destinasi premium, keseimbangan ini menjadi krusial untuk menjaga momentum pertumbuhan.

Industri MICE sendiri, sebagaimana dijelaskan Davidson & Cope (2003), merupakan bagian strategis dari pariwisata bisnis dengan nilai ekonomi tinggi. Di Labuan Bajo, MICE tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai sarana promosi destinasi yang efektif. Namun, ketergantungan berlebihan pada anggaran pemerintah membuat sektor ini rentan terhadap fluktuasi kebijakan fiskal. Rogers (2013) menekankan bahwa keberlanjutan MICE memerlukan diversifikasi sumber pendanaan dan inovasi produk, seperti menggabungkan konsep bisnis dan *leisure* (*bleisure tourism*), agar tidak sepenuhnya bergantung pada APBD atau APBN.

Di sinilah pentingnya ketahanan (*resilience*) dalam industri pariwisata. Teori ketahanan pariwisata (Biggs, Hall & Stoeckl, 2012) menawarkan kerangka berpikir tentang bagaimana sektor pariwisata dapat bertahan dan beradaptasi terhadap guncangan eksternal—baik itu krisis ekonomi, bencana alam, maupun perubahan kebijakan. Dalam konteks efisiensi anggaran, adaptasi bisa dilakukan melalui inovasi model acara (misalnya hybrid event yang menggabungkan daring dan luring), penguatan kolaborasi dengan pelaku UMKM, serta penciptaan nilai tambah berbasis kearifan lokal.

Dengan demikian, landasan teori ini tidak hanya menjelaskan tantangan yang dihadapi industri MICE di Labuan Bajo akibat kebijakan efisiensi anggaran, tetapi juga membuka ruang untuk solusi berbasis ketahanan dan inovasi. Di tengah keterbatasan fiskal, pelaku industri dan pemangku kebijakan ditantang untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang tidak hanya efisien, tetapi juga tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap pertumbuhan industri MICE di Kota Labuan Bajo. Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif digunakan ketika peneliti ingin mengeksplorasi makna yang dibangun oleh individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial yang kompleks. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan karakteristik fenomena yang diteliti, yaitu bagaimana pelaku industri MICE di Labuan Bajo merespons dan terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami realitas sosial melalui penggambaran mendalam dan interpretasi terhadap makna yang dikonstruksi oleh subjek penelitian Moleong (2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah Event MICE per Tahun

Data menunjukkan penurunan signifikan dalam jumlah kegiatan MICE di Labuan Bajo, dari sekitar 60 acara pada tahun 2022 menjadi hanya 35 acara pada 2023. Penurunan ini terutama terjadi pada acara yang sebelumnya diselenggarakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah, seperti rapat koordinasi, pelatihan teknis, seminar nasional, dan forum kebijakan. Sebagian besar agenda tersebut dibatalkan, ditunda, atau dikonsolidasikan menjadi satu kegiatan ringkas sebagai respons langsung terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang membatasi penggunaan dana perjalanan dinas dan kegiatan luar kantor.

Temuan ini mengungkap kerentanan struktural dalam model pengembangan pariwisata Labuan Bajo: pertumbuhan MICE-nya dibangun hampir sepenuhnya di atas fondasi anggaran publik, bukan permintaan pasar yang berkelanjutan. Ketika kebijakan fiskal berubah, tidak ada mekanisme substitusi dari sektor swasta, asosiasi profesional, atau event internasional yang mampu mempertahankan volume kegiatan. Hal ini menunjukkan kegagalan dalam strategi diversifikasi pasar sejak awal penetapan Labuan Bajo sebagai Destinasi Super Prioritas. Tanpa portofolio penyelenggara yang seimbang, destinasi ini rentan terhadap setiap fluktuasi kebijakan di tingkat pusat, yang merupakan sebuah paradoks dalam upaya membangun pariwisata yang “tangguh dan berkelanjutan”.

Jumlah Peserta

Jumlah peserta kegiatan MICE di Labuan Bajo mengalami penurunan antara 30–50% pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Acara yang tetap berlangsung umumnya diselenggarakan dalam skala lebih kecil, dengan peserta yang sebagian besar berasal dari wilayah Nusa Tenggara Timur atau instansi lokal. Selain itu, banyak penyelenggara beralih ke format hybrid, sehingga hanya sebagian peserta yang hadir secara fisik, sementara sisanya mengikuti secara daring. Partisipasi dari luar daerah, terutama dari Jakarta, Surabaya, dan Bali mengalami penurunan drastis akibat pembatasan anggaran perjalanan dan pertimbangan biaya aksesibilitas yang tinggi.

Penurunan ini mencerminkan pergeseran strategi manajemen risiko oleh penyelenggara, yang kini memprioritaskan efisiensi biaya daripada dampak ekonomi lokal. Format *hybrid*, meski efektif secara operasional, justru menggerus salah satu pilar utama pariwisata: kehadiran fisik. Peserta virtual tidak memerlukan akomodasi, transportasi, atau konsumsi di restoran, yang merupakan elemen-elemen yang selama ini menggerakkan ekonomi mikro di Labuan Bajo. Lebih jauh, posisi geografis destinasi yang terpencil memperparah kerentanannya: ketika dana perjalanan dipangkas, Labuan Bajo menjadi destinasi pertama yang dihapus dari daftar tujuan. Ini menunjukkan bahwa daya saing destinasi tidak hanya ditentukan oleh keindahan alam, tetapi juga oleh aksesibilitas dan keberlanjutan permintaan, yang merupakan dua aspek yang selama ini kurang diperhatikan dalam perencanaan MICE.

Lama Tinggal Peserta

Rata-rata lama tinggal peserta MICE di Labuan Bajo menurun dari 2–3 malam pada periode sebelumnya menjadi hanya 1–2 malam pada 2023. Perubahan ini terjadi karena instansi pemerintah memangkas durasi acara demi meminimalkan biaya akomodasi dan konsumsi harian. Agenda yang sebelumnya dirancang dengan ruang untuk *networking* atau eksplorasi destinasi kini dikompresi menjadi pertemuan teknis singkat, sering kali diselesaikan dalam satu hari penuh. Akibatnya, peserta cenderung tiba pagi hari dan langsung kembali ke daerah asal pada sore atau malam harinya.

Pemendekan durasi tinggal bukan hanya mengurangi pendapatan hotel, tetapi juga

memangkas peluang ekonomi di sektor pendukung seperti tur lokal, kuliner, dan transportasi, yang sangat bergantung pada interaksi jangka pendek dengan peserta. Lebih dari itu, tanpa insentif institusional atau desain acara yang strategis, peserta tidak memiliki alasan untuk memperpanjang masa tinggal, meskipun Labuan Bajo menawarkan atraksi alam dan budaya yang unik. Dalam jangka panjang, pengalaman singkat ini berisiko membentuk persepsi bahwa Labuan Bajo hanyalah lokasi administratif sementara, bukan destinasi yang layak dijelajahi, merupakan sebuah ancaman serius terhadap *positioning*-nya sebagai destinasi premium.

Pendapatan Sektor Pendukung

Pendapatan sektor pendukung yang meliputi hotel, jasa transportasi, kuliner, UMKM, hingga penyewa kapal wisata mengalami penurunan sebesar 20–25% selama musim MICE 2023. Penurunan ini terjadi secara merata, mulai dari restoran yang kehilangan pesanan catering, pengemudi ojek yang sepi penumpang, hingga nelayan yang tidak lagi diminta menyediakan ikan segar untuk acara resmi. Bahkan pedagang souvenir dan penenun ikat melaporkan penurunan drastis dalam penjualan, karena tidak ada lagi delegasi yang membeli oleh-oleh dalam jumlah besar.

Kontraksi ini adalah bukti empiris melemahnya efek pengganda (*multiplier effect*) yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi pariwisata Labuan Bajo. Ekosistem lokal ternyata sangat terintegrasi, namun juga sangat rentan: ketika satu mata rantai, yang dalam hal ini acara pemerintah menjadi terputus, seluruh sistem ikut goyah, dan yang paling terdampak adalah pelaku usaha mikro yang tidak memiliki akses langsung ke kontrak resmi, sehingga hanya menikmati dampak ekonomi dari aktivitas MICE. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sebelumnya bersifat eksklusif dan tidak inklusif. Tanpa kebijakan yang secara aktif melibatkan UMKM dalam rantai nilai MICE, misalnya melalui paket wajib konsumsi lokal atau pelatihan kewirausahaan, pemulihan ekonomi akan tetap timpang dan tidak berkelanjutan.

Tingkat Hunian Hotel

Tingkat hunian hotel selama puncak musim MICE di Labuan Bajo turun dari kisaran 85–95% pada 2022 menjadi hanya 60–70% pada 2023. Di luar akhir pekan dan periode acara, okupansi bahkan jatuh jauh di bawah ambang profitabilitas, menunjukkan bahwa segmen *leisure tourism* belum mampu menggantikan peran MICE. Hotel-hotel yang sebelumnya mengandalkan kepastian pendapatan dari acara pemerintah kini menghadapi ketidakpastian operasional, termasuk kesulitan dalam perencanaan staf dan pemeliharaan fasilitas. Beberapa akomodasi skala kecil bahkan terpaksa menutup sementara atau mengalihkan fokus ke segmen harian yang margin keuntungannya jauh lebih rendah.

Penurunan okupansi ini menggarisbawahi kegagalan dalam membangun strategi penyangga terhadap risiko kebijakan fiskal. Sejak awal, tidak ada upaya sistematis untuk menciptakan portofolio pasar yang seimbang antara pemerintah, korporasi swasta, dan wisatawan individu. Akibatnya, ketika satu pilar runtuh, seluruh struktur ekonomi pariwisata ikut kolaps. Lebih memprihatinkan, disparitas kapasitas adaptasi antar pelaku usaha semakin melebar: hotel berjejaring mampu bertahan melalui diversifikasi, sementara usaha lokal yang justru menjadi wajah autentik destinasi terancam gulung tikar. Jika tidak segera diatasi melalui kolaborasi terpadu dan insentif retensi, Labuan Bajo berisiko kehilangan bukan hanya pendapatan, tetapi juga identitas pariwisatanya yang seharusnya berakar pada kekuatan lokal.

Berdasarkan fenomena lapangan dan praktik bisnis pariwisata di Labuan Bajo, berikut adalah gambaran upaya-upaya adaptif yang dilakukan:

Leisure Package All-in-One

Inisiatif diversifikasi produk MICE di Labuan Bajo mencerminkan respons strategis terhadap ketergantungan berlebihan pada anggaran publik, sekaligus upaya memperkuat nilai

tambah destinasi dalam persaingan antardestinasi pariwisata. Dengan mengintegrasikan elemen *leisure* ke dalam agenda bisnis, melalui konsep *bleisure*, pelaku industri tidak hanya memperpanjang durasi tinggal peserta, tetapi juga meningkatkan potensi belanja wisatawan secara signifikan. Pendekatan ini mengubah MICE dari sekadar kegiatan administratif menjadi pengalaman holistik yang memadukan profesionalisme dengan eksplorasi wisata. Model paket “2 hari *meeting* + 1 hari *leisure*” misalnya, dirancang untuk memaksimalkan waktu tanpa menambah beban logistik berlebihan bagi penyelenggara. Strategi ini menunjukkan pemahaman mendalam bahwa daya saing Labuan Bajo tidak terletak pada infrastruktur semata, melainkan pada keunikan ekosistem maritim dan warisan budaya Manggarai itu sendiri.

Integrasi atraksi wisata dan proses berlangsungnya kegiatan akan berdampak pada penguatan stakeholder, dalam hal ini masyarakat sebagai penyedia jasa wisata budaya dan sebagainya. Penggunaan produk UMKM, seperti kopi Manggarai, ikan segar lokal, atau kerajinan tangan, dalam *coffee break* dan *gala dinner* merupakan ide yang sangat baik dalam upaya mendukung konsep berkelanjutan. Pertunjukan tarian *caci* atau tarian adat lainnya tidak hanya memperkaya pengalaman peserta, tetapi juga memberikan ruang bagi pelestarian budaya. Hal ini menandai pergeseran dari pariwisata ekstraktif menuju model inklusif yang melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan aktif. Dengan demikian, dalam jangka panjang, pendekatan ini berpotensi membangun identitas MICE Labuan Bajo yang autentik dan berakar pada lokalitas.

Penerapan Hybrid Event

Penerapan model hybrid event di Labuan Bajo mencerminkan respons adaptif yang realistis terhadap keterbatasan anggaran dan perubahan perilaku penyelenggara pasca-pandemi. Dengan menggabungkan komponen daring dan luring, pelaku industri berupaya mempertahankan relevansi destinasi tanpa bergantung sepenuhnya pada kehadiran fisik peserta yang kini dibatasi oleh kebijakan efisiensi. Penyediaan studio mini dan infrastruktur digital di sejumlah hotel serta *convention hall* menunjukkan kesadaran bahwa teknologi bukan lagi pelengkap, melainkan prasyarat kompetitif dalam ekosistem MICE kontemporer. Langkah ini memungkinkan penyelenggara memperluas jangkauan audiens secara geografis, sekaligus mengurangi tekanan terhadap kapasitas akomodasi dan logistik lokal. Namun, transformasi ini juga menuntut pergeseran paradigma dari penyelenggaraan acara berbasis lokasi menjadi pengelolaan pengalaman berbasis platform.

Investasi dalam fasilitas *streaming* konektivitas internet merupakan langkah strategis yang tidak boleh dipandang sebagai sekadar respons jangka pendek. Infrastruktur digital yang andal menjadi fondasi bagi Labuan Bajo untuk tetap masuk dalam radar penyelenggara nasional. Meskipun peserta virtual tidak memberikan kontribusi langsung terhadap pendapatan hotel atau kuliner, keberadaan mereka memperkuat legitimasi akademik dan profesional, yang pada gilirannya dapat menarik sponsor atau mitra strategis. Selain itu, rekaman acara *hybrid* dapat digunakan sebagai aset promosi jangka panjang untuk menarik penyelenggara di masa depan. Dengan demikian, teknologi berfungsi ganda: sebagai alat operasional sekaligus instrumen pemasaran destinasi.

Secara strategis, penerapan *hybrid event* seharusnya dilihat bukan sebagai pengganti, melainkan sebagai pelengkap dalam ekosistem MICE yang lebih luas. Model ini paling efektif ketika digunakan untuk memperluas audiens inti, bukan menggantikan kehadiran fisik sepenuhnya. Idealnya, acara di Labuan Bajo dirancang sedemikian rupa sehingga peserta utama tetap hadir secara langsung untuk memicu efek ekonomi lokal. Sementara audiens sekunder mengikuti secara daring. Pendekatan bertingkat semacam ini memungkinkan destinasi mampu menampilkan produk unggulan untuk mendukung ekonominya. Jika dikembangkan dengan visi jangka panjang,

hybridisasi dapat menjadi jembatan transisi menuju model MICE yang lebih berkelanjutan, meski berada di tengah kondisi yang tidak menguntungkan, khususnya efisiensi anggaran.

Kolaborasi dengan UMKM Lokal

Integrasi UMKM lokal ke dalam ekosistem MICE di Labuan Bajo merupakan langkah strategis yang bisa berpotensi menguntungkan. Model ini dapat berupa modifikasi produk dengan bantuan tangan kreatif lokal, yakni dalam hal ini unit UMKM. Contohnya, memasukkan kopi Manggarai, tenun ikat, kuliner tradisional, dan kerajinan tangan sebagai bagian dari pengalaman yang didapatkan oleh para peserta. Kolaborasi semacam ini juga membuka ruang bagi inovasi dalam desain paket MICE yang lebih kontekstual dan berkelanjutan.

Standarisasi atau istilah lain seperti kalibrasi menu lokal merupakan salah satu upaya atau trobosan yang mendukung ide kolaboratif ini. Misalnya katering yang dipersiapkan untuk para peserta setelah melalui proses pengawasan yang bersertifikat atau pun yang sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BPOM, sudah bisa dihidangkan di meja makan peserta. Penyelenggara pun dapat dengan mudah bekerja sama dengan ibu-ibu rumah tangga setempat untuk menyediakan hidangan tradisional dalam kemasan ramah lingkungan, atau mengganti *goodie bag* plastik dengan tas tenun ikat yang diproduksi komunitas perempuan di Manggarai. Atau pun aktivitas pendukung seperti *workshop* menenun atau demo memasak kuliner Manggarai dapat mengibur sekaligus memberikan edukasi lintas budaya yang memperdalam keterlibatan peserta.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan temuan lapangan, penelitian ini menyimpulkan bahwa: Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah memiliki dampak negatif signifikan terhadap pertumbuhan industri MICE di Labuan Bajo. Dampak tersebut terlihat pada penurunan jumlah event, peserta, lama tinggal, pendapatan sektor pendukung, dan tingkat hunian hotel. Penurunan ini bukan hanya bersifat sementara tetapi menunjukkan kerentanan struktural dalam model pengembangan MICE yang dominan berbasis dana publik. Model pengembangan MICE saat ini kurang tahan terhadap guncangan fiskal karena ketergantungan tinggi pada kegiatan yang dibiayai pemerintah dan kurangnya diversifikasi penyelenggara dari sektor swasta atau internasional. Akibatnya, kebijakan efisiensi anggaran mempercepat potensi stagnasi atau penurunan dalam siklus hidup destinasi (TALC). Adopsi strategi adaptif (hybrid event, konsep bleisure, kolaborasi dengan UMKM) terbukti membantu meredam dampak, tetapi belum cukup menggantikan hilangnya volume ekonomi yang dihasilkan oleh event tradisional. Inisiatif-inisiatif ini bersifat fragmentaris dan memerlukan skala serta integrasi yang lebih kuat agar efektif secara ekonomi. Dampak terbesar dirasakan oleh pelaku usaha mikro dan informal, yang selama ini menjadi penerima manfaat langsung dari event MICE (katering lokal, penyedia suvenir, nelayan, pemandu lokal). Ini berpotensi meningkatkan ketimpangan ekonomi lokal jika tidak ada intervensi kebijakan yang pro-inklusif.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Analytica, A. (2023). Indonesia MICE Market Size, Share, Growth Analysis Report 2023–032. Diakses dari <https://www.astuteanalytica.com/industry-report/indonesia-mice-market>
- [2] Biggs, D., Hall, C. M., & Stoeckl, N. (2012). The resilience of formal and informal tourism enterprises to disasters: Reef tourism in Phuket, Thailand. *Journal of Sustainable Tourism*, 20(5), 645–665. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.630080>
- [3] Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. *The Canadian Geographer*, 24(1), 5–12.
- [4] Celios. (2024). Efisiensi Belanja Pemerintah, Industri MICE Perlu Dapat Paket Kebijakan. *New Neraca*. Diakses dari <https://www.newneraca.neraca.co.id/article/213843/efisiensi-belanjapemerintah-industri-mice-perlu-dapat-paket-kebijakan>
- [5] Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications
- [6] Davidson, R., & Cope, B. (2003). *Business Travel: Conferences, Incentive Travel, Exhibitions, Corporate Hospitality and Corporate Travel*. London: Pearson Education.
- [7] Diandra, K. H. (2024). Peran Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Pariwisata. *Jurnal abdimas Pariwisata*. Vol. 5 No. 2 Tahun 2024. Hlm 82
- [8] Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Boston: Pearson Education.
- [9] Fletcher, J. (1989). Input-output analysis and tourism impact studies. *Annals of Tourism Research*, 16(4), 514–529.
- [10] Horwath HTL. (2025). Indonesia: The Impact of Government Austerity Measures on the Hospitality Industry. Diakses dari <https://horwathhtl.com/publication/indonesia-the-impact-of-government-austerity-measures/>
- [11] Kompas.id. (2024, 6 Desember). Terimbas Pemangkasan Anggaran, Industri Jasa Dorong Kolaborasi. Diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/en-terdampak-pemangkasananggaran-industri-jasa-dorong-kolaborasi>
- [12] LPEM FEB UI. (2024). Strategi Mitigasi Dampak Pemangkasan Belanja Pemerintah terhadap Industri Pariwisata dan MICE. [Laporan Kebijakan Tidak Dipublikasikan].
- [13] Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [14] Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- [15] Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- [16] Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
- [17] Ritchie, J. R. B., & Crouch, G. I. (2003). *The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective*. Wallingford: CABI Publishing.
- [18] Rogers, T. (2013). *Conferences and Conventions: A Global Industry* (3rd ed.). London: Routledge.
- [19] Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.